TAK ADA KATA LELAH, BUPATI IRSYAD AKAN BAWA URUSAN PRONA KE PEMERINTAH PUSAT



Senin, 6 Maret 2017

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, berkomitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat terkait program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Program yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara gratis ini ternyata dibebani biaya pra pendaftaran di lapangan.

Irsyad menganggap hal tersebut sebagai miskomunikasi antara pemohon dan kepala desa dan berharap pemerintah pusat mengevaluasi aturan yang ada. Pemkab Pasuruan akan mengirimkan surat kepada Kementerian Agraria untuk meninjau ulang aturan Prona dan meminta kejelasan terkait biaya pra pendaftaran.

Irsyad menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan siap untuk mendanai Prona agar masyarakat terbantukan. Ia juga meminta aparat desa untuk tidak menghentikan program Prona yang sudah berjalan dan meminta mereka untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan program tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Irsyad akan mengatur besaran biaya pra pendaftaran melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati dengan koordinasi bersama pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepala desa dalam menarik biaya pendaftaran.

Irsyad berharap dengan langkah-langkah yang diambilnya, permasalahan Prona di Kabupaten Pasuruan dapat terselesaikan dengan baik dan masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari program tersebut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.